

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan penerimaan pajak sangat penting bagi negara, oleh karena itu Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak yang merupakan instansi pemerintahan di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi pajak yang bertujuan agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang mencakup tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan sistem pemungutan pajak. (Ramadiansyah, *et al*, 2014). Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistemik maupun operasional. Perbaikan sistem perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan yang tersedia dengan menjunjung asas keadilan sosial. Salah satu upaya perbaikan sistem perpajakan di Indonesia adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Terdapat lima perubahan penting dalam peraturan pajak penghasilan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diantaranya (1) perubahan penghasilan tidak kena pajak; (2) insentif bagi

sumbangan wajib keagamaan; (3) insentif bagi perusahaan terbuka di bursa efek; (4) insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah berupa potongan tarif hingga 50%; serta (5) beberapa butir pengurangan penerimaan (Syahdan dan Rani, 2013).

Target penerimaan pajak yang setiap tahunnya mengalami peningkatan tentu harus dibarengi upaya ataupun strategi yang harus ditempuh negara dalam hal ini Dirjen Pajak. Salah satu upaya peningkatan penerimaan pajak yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak adalah peningkatan jumlah wajib pajak. Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan *tax ratio*, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Solich Jamin (2001) dalam (Anggraeni, *et. al.* 2013) secara langsung menyatakan bahwa perlu peningkatan kepatuhan pajak guna meningkatkan *tax ratio*. Berdasarkan penelitian Solich Jamin (2001) dalam (Anggraeni, *et. al.* 2013) juga diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan (WP Badan) dan wajib pajak orang pribadi (WP OP) ternyata lebih tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentunya akan menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat, terutama yang terdaftar sebagai Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) maupun Wajib Pajak Badan (WP Badan). Lebih lanjut, salah satu kebijakan pemerintah yang menjadi pro dan kontra saat ini adalah kebijakan pajak bagi UKM sebesar 1 % dari omzet. Salah satu bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari perilaku kepatuhan pajak. Perilaku kepatuhan pajak menjadi sesuatu yang sangat penting karena pada saat yang bersamaan akan timbul upaya penghindaran pajak (*tax*

evasion) yang berdampak pada besarnya penerimaan negara dari pajak (Syahdan dan Rani, 2013).

Menurut Jackson dan Milliron dalam Andarini, 2010, salah satu variabel nonekonomi kunci dari perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak. Menurut Vogel, Spicer, dan Becker dalam Andarini (2010) pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya dimensi keadilan pajak sebagai variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pembayar pajak.

Pemerintah telah menerbitkan PP No 46 Th. 2013 tentang pajak UKM, yang substansinya adalah pungutan pajak sebesar 1% dari omzet < 4,8 miliar per-tahun terhadap WP badan maupun OP, yang berlaku mulai 1 Juli 2013. Sekilas nampak memudahkan, namun terdapat potensi ketidakadilan karena margin UKM yang berbeda-beda. Sebuah ilustrasi, realitanya sejumlah pengusaha jasa dari berbagai sektor mungkin akan senang menyambut lahirnya kebijakan ini. Betapa tidak, dengan margin keuntungan yang bisa dicapai 50 persen, mereka cukup mengeluarkan pajak sebesar 1 persen saja. Disisi lain, ketika omzet sudah mendekati 4,8 miliar setahun, seperti yang disyaratkan kebijakan ini, terbuka kemungkinan pelaku UKM *mensplit* entitas usahanya agar tetap dikenai pajak 1 persen. Sementara di sektor lain, sejumlah pengusaha kecil bermargin laba lebih rendah justru kelimpungan. Dampak kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan sembako menjadi beban bagi kelangsungan usahanya (Syahdan dan Rani, 2013).

Maksud dari pemberlakuan pungutan atas UKM beromzet Rp.300 juta sampai maksimal Rp4,8 Milyar merupakan wujud kemudahan yang diberikan pemerintah (Rahmani dalam Majalah Akuntansi Indonesia, 2013). Pasalnya, jika pelaku UKM menolak untuk mengikuti kebijakan tersebut, justru bakal dikenai pajak umum yang lebih besar dan lebih memberatkan.

Tidak dipungkiri memang, hingga kini masih banyak sektor UKM yang belum menjadi wajib pajak. Padahal, dari sisi pendapatan seharusnya sudah layak menjadi objek pajak. Fuad Rahmani dalam Majalah Akuntansi Indonesia(2013) menyatakan bahwa kebijakan ini sebagai bentuk keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena pajak bicara keadilan. Namun, Richardson (2006) dalam Andarini, 2010, menemukan bahwa hasil dari penelitian-penelitian mengenai pengaruh dimensi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak ini tidak konsisten. Salah satu alasan utama ketidakkonsistenan hasil ini adalah sifat multidimensional dari keadilan pajak sebagai variabel kepatuhan pajak yang juga dipengaruhi budaya nasional (Andarini, 2010).

Berdasarkan survei dari Direktorat Jendral Pajak (DJP), tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah. Tercatat untuk WP Orang Pribadi, dari potensi sekitar 60 juta orang baru sekitar 25 juta yang telah membayar pajak. Sementara WP Badan, DJP mencatat baru sekitar 520 WP yang membayar pajak dari sekitar 5 juta badan usaha yang memiliki laba. Sementara untuk pelaku UKM masih jauh dari harapan, berdasarkan Sensus Pajak Nasional (SPN) Tiong (2014). Kasus diatas, mencerminkan bahwa dengan diterbitkannya PP No. 46 Tahun 2013 para pengusaha UMKM masih enggan

untuk patuh melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaksanakan kewajibannya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, salah satunya adalah keadilan pajak. Tiong (2014) telah meneliti mengenai pengaruh persepsi keadilan atas PP 46 Tahun 2013, pengetahuan PP 46 Tahun 2013, ketegasan sanksi dan sosialisasi pemerintah atas PP 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi keadilan atas PP 46 Tahun 2013, pengetahuan PP 46 Tahun 2013, ketegasan sanksi dan sosialisasi pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. (Susmiatun dan Kusmuriyanto, 2014) juga meneliti mengenai pengaruh pengetahuan, ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Salma dan Farid (2008) dalam penelitiannya faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sikap dan moral wajib pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan moral wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Aryati (2012) dalam penelitiannya yang mempengaruhi kepatuhan wajib badan salah satunya adalah moral individu *tax profesional* pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

moral individu *tax profesional* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

Sari dan Mangoting (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh keadilan dan komunikasi terhadap kepatuhan sukarela. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh positif antara keadilan dan komunikasi terhadap kepatuhan sukarela. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi keadilan dalam perpajakan yang dirasakan (didapatkan) wajib pajak, maka wajib pajak akan melakukan kepatuhan sukarela dan dengan adanya kualitas informasi yang baik yang disampaikan kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan melakukan kepatuhan sukarela.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dimensi Keadilan, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Moral Wajib Pajak dan Komunikasi Setelah Pemberlakuan PP No. 46 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”**. (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pelaku UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Karanganyar). Penelitian ini merupakan pengembangan dari Syahdan dan Rani (2013), perbedaan penelitian ini dengan Penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian dan adanya beberapa variabel lain yang di masukan dalam penelitian ini yaitu variabel pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak dari Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014), variabel moral wajib pajak dalam Aryati (2012) dan variabel komunikasi dalam Sari dan Mangoting (2014).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dimensi Keadilan setelah pemberlakuan PP No. 46 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Apakah pengetahuan Pajak setelah pemberlakuan PP No. 46 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Apakah sanksi pajak setelah pemberlakuan PP No. 46 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
4. Apakah moral wajib pajak setelah pemberlakuan PP No. 46 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
5. Apakah komunikasi setelah pemberlakuan PP No. 46 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh dimensi Keadilan setelah pemberlakuan PP No. 46 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan Wajib Pajak setelah pemberlakuan PP No. 46 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak setelah pemberlakuan PP No. 46 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Untuk mengetahui pengaruh moral wajib pajak setelah pemberlakuan PP No. 46 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
5. Untuk mengetahui pengaruh komunikasi setelah pemberlakuan PP No. 46 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pemilik atau pelaku UKM
 Memberikan dasar pemahaman yang kuat bahwa dengan diterapkannya dimensi keadilan, sanksi pajak yang tegas, moral wajib pajak, komunikasi dan pengetahuan wajib pajak yang tinggi atas pentingnya pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi Direktorat Jendral Pajak
 Memberikan informasi serta masukan kepada Direktorat Jendral Pajak, bahwa pelaksanaan dimensi keadilan, pengetahuan pajak, sanksi pajak moral wajib pajak, dan komunikasi diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Bagi akademisi
 Hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat topik yang sama.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, usaha mikro kecil dan menengah, pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013

tentang pajak UMKM, peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak UMKM, dimensi keadilan, pengetahuan pajak, sanksi pajak, moral wajib pajak, komunikasi, kepatuhan wajib pajak, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis, serta perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis penelitian, variabel-variabel penelitian populasi dan sampel teknik pengumpulan data, sumber data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil data, dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.